

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Urung Pinjam Dana Untuk Bangun RSUD

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.2

Edisi : Rabu, 30 Mei 2018

## Urung Pinjam Dana untuk Bangun RSUD

**SOREANG, (PR).-**

Pemkab Bandung memutuskan untuk tidak menggunakan dana pinjaman dari BUMN Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam pembangunan RSUD Soreang. Pemkab akan menggunakan dana APBD selama tiga tahun anggaran dengan nilai alokasi sebesar Rp 327 miliar.

"Kita akan pakai dana sendiri untuk membangun RSUD Soreang di Desa Cingcin, Soreang, dengan cara *multiyears* tiga tahun. Pada tahun 2018 ini kami anggarkan Rp 100 miliar," kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung, Marlan, di ruang kerjanya, Senin (28/5/2018).

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung mempertimbangkan memakai dana pinjaman PT SMI untuk membangun RSUD Soreang mengingat kebutuhan anggaran yang besar. Bunga pinjaman pun dianggap lebih rendah daripada bank, yakni sekitar 6 persen/tahun.

Lebih jauh Marlan mengatakan, untuk tahun 2019 kembali dianggarkan sekitar Rp 130 miliar dan terakhir tahun 2020 Rp 100 miliar. "Saat ini sedang dilakukan lelang konsultan lalu lelang fisik bangunannya sehingga pada September atau

Oktober sudah dimulai pembangunan fondasinya," katanya.

Anggaran pembangunan RSUD Soreang, kata Marlan, mengalami efisiensi dari sebelumnya di atas Rp 400 miliar menjadi Rp 327 miliar. "Kami lakukan penyederhanaan bangunan dari awal enam lantai menjadi lima lantai. Bangunan pendukung rumah sakit seperti *laundry* dan gizi kini masuk ke bangunan utama dari awalnya terpisah," ucapnya.

Mengenai alasan tidak jadi pinjam ke PT SMI, Marlan mengatakan, karena DPRD dan Pemkab Bandung sudah menyetujui APBD tahun 2018 yang di dalamnya ada anggaran pembangunan RSUD Soreang.

"Sedangkan PT SMI mensyaratkan semua dana pembangunan dari pinjaman atau anggaran APBD harus nol. Susah untuk mengalihkan anggaran yang sudah diketok palu," katanya.

Pembangunan RSUD Soreang sendiri dinilai Marlan sudah sangat mendesak karena jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung terbatas. "Akibatnya penyediaan tempat tidur rawat inap juga tak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang sudah 3,5 juta orang," katanya. **(Sarnapi)**

\*\*\*